



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : _dishubinfokom@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 46 / I / 2025

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP);
- b. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2024, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 32).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berikut lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO,



FX. TONI SRI BUNTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bapperida Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Arsip.
-



TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



dishub@sukoharjokab.go.id

<https://dishub.sukoharjokab.go.id>



(0271) 593037


Jl. Rajawali No. 7, Mojotegalan, Joho,
Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo



PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LkjiP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024. Semoga LKjIP ini dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja (berupa pengukuran kinerja) dalam rangka menjamin adanya peningkatan kinerja dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Sebagai bahan penyempurnaan, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sukoharjo, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX . TONI SRI BUNTORO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian misi dan visi Bupati Sukoharjo . Laporan Kinerja ini merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan, dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program serta beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategi yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja. Adapun Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARANA STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	PENGHEMATAN	SATUAN	CAPAIAN s.d 2023	DATA CAPAIAN KINERJA 2024			TARGET AKHIR RENSTR A (2026)	% CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA
								TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN THD REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Rp 2.250.027.400	Rp 2.104.597.346	Rp 145.430.054	Persen	0,0%	0,85	0	200,00%	0,50%	200%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Rp39.794.994.567	Rp 38.731.847.762	Rp1.063.146.805	Persen	11,98%	18,5	16,9	108,65%	17,50%	103%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Rp 9.005.090.724	Rp 7.837.572.198	Rp1.360.694.360	Angka	65,44	75	75,86	101,15%	79	96%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebesar 0% dari target 0,85% atau sebesar 200% prosentasenya. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Persentase angka kecelakaan sarana transportasi tercapai dan dapat dijelaskan bahwa tidak ada kecelakaan yang meninggal dunia diakibatkan karena sarana transportasi (kendaraan yang telah diuji). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, prosentase angka kecelakaan sarana transportasi memiliki nilai yang sama yaitu 0,00%. Dan jika dibandingkan dengan prosentase capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 200%. Selanjutnya realisasi Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi di tahun 2024 sebesar 16,9% dari target 18,5% atau sebesar 108,65%. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi dapat dikatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi mengalami penurunan dari 11,98% menjadi 16,9% hal ini dikarenakan prasarana jalan yang terpasang di jalan Kabupaten belum optimal dikarenakan masih dibutuhkan banyak prasarana jalan yang belum terpasang. Sasaran strategis terkait dengan Sekretariat yaitu Nilai SAKIP, ditahun 2024 nilai SAKIP dapat mencapai target yang telah ditentukan, dengan realisasi 75,86 dari target 75. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan dari 65,44 menjadi 75,86.

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Bidang Perhubungan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPPA tahun 2024 adalah sebesar Rp 51.050.112.691,- sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp 48.674.017.306,- atau sebesar 95,35%.

Disamping itu, realisasi pendapatan tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.277.077.700,- dari target Rp 1.271.385.500,- atau sebesar 100,45% prosentasenya. Hal ini dikarenakan setiap retribusi pendapatan yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, retribusi pemanfaatan aset daerah untuk menyediakan pelayanan penumpang umum telah mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Penghargaan.....	17
D. Permasalahan Utama.....	20
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. Perencanaan Strategis	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	24
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	79
BAB IV P E N U T U P	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	36
Tabel 3.2 Kejadian Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia terkait Peran Dishub	36
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024	37
Tabel 3.4 Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana.....	38
Tabel 3.5 Capaian Perjanjian Kinerja 2024	39
Tabel 3.6 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024.....	39
Tabel 3.7 Capaian Indikator IKU Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024.....	40
Tabel 3.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024.....	40
Tabel 3.9 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	41
Tabel 3.10 Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024.....	41
Tabel 3.11 Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra	43
Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	44
Tabel 3.13 Skor Pemenang Abdi Yasa	52
Tabel 3.14 Jadwal Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2024.....	62
Tabel 3.15 Tabel efisiensi penggunaan sumber daya untuk Mencapai Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	69
Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	72
Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	78
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	80
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 9 titik Halte Pengadaan Tahun 2024	48
Gambar 2 Pelayanan Uji KIR	49
Gambar 3 Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji.	49
Gambar 4 Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor.....	50
Gambar 5 Persiapan Apel Uji Petik	51
Gambar 6 Pelaksanaan Uji Petik.....	51
Gambar 7 Pemilihan Abdi Yasa.....	52
Gambar 8 Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba.....	53
Gambar 9 Pemasangan Guard Rail Beam di Desa Sanggang.....	53
Gambar 10 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Telukan - Pasar Cuplik	55
Gambar 11 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Mulur - Bancaan	55
Gambar 12 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tanjunganom - Daleman.....	55
Gambar 13 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Sidan - Triyagan	56
Gambar 14 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tinggen - Stasiun Gawok	56
Gambar 15 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Wirun - Palur	56
Gambar 16 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Blimbing - Sanggung	56
Gambar 17 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Mulur - Cabean	57
Gambar 18 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Gentan - Bekonang	57
Gambar 19 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Ngasinan - Bulu	57
Gambar 20 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tawang Sari - Bulu.....	58
Gambar 21 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Dalangan - Lengking	58
Gambar 22 Tiang Lampu Oktagonal Galvanis 9Meter	58
Gambar 23 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Gunung Slamet	59
Gambar 24 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kh. Agus Salim.....	59
Gambar 25 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan kh. Samanhudi	59

Gambar 26 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Gentan - Bekonang	60
Gambar 27 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Glondongan - Tugu	60
Gambar 28 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Mulur - Sidan.....	60
Gambar 29 Gambar. Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Sugihan - Bendosari.....	61
Gambar 30 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bekonang - Kayuapak	61
Gambar 31 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bekonang - Mojo	61
Gambar 32 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Wirun - Palur	62
Gambar 33 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bendosari.....	62
Gambar 34 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA N 1 Mojolaban	63
Gambar 35 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA N 1 Weru	63
Gambar 36 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Bendosari	64
Gambar 37 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di Taman Pakujoyo	64
Gambar 38 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Mojolaban.....	64
Gambar 39 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di MTS N 3 Bendosari	64
Gambar 40 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban	65
Gambar 41 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 Mojolaban.....	65
Gambar 42 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Mojolaban.....	65
Gambar 43 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Grogol.....	65
Gambar 44 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD N 4 Wirun	66
Gambar 45 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD Mutiara Insan	66
Gambar 46 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA Al-Ahzar Solobaru..	66
Gambar 47 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Sukoharjo.....	66
Gambar 48 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 Sukoharjo.....	67
Gambar 49 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Sukoharjo.....	67
Gambar 50 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 & 3 Bulu.....	67
Gambar 51 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Bulu	67
Gambar 52 Gambar Pendokumentasian Dokumen Perencanaan Daerah	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024.

LKjIP Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang telah ditetapkan.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.

a. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- 5) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh struktur di bawahnya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;

- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
- 3) penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL),
- 4) pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;

- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

- a) Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- b) Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
- c) Sub Koordinator Perpakiran.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;

- 3) pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
- 4) penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
- 6) penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;
- 7) penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
- 8) pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- a) Sub Koordinator Angkutan;
- b) Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;
- c) Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 3) pengoordinasian kegiatan pengawalan dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;
- 4) penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;

- 5) pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
- 6) pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

- a) Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
- b) Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
- c) Sub Koordinator Perkeretaapian.

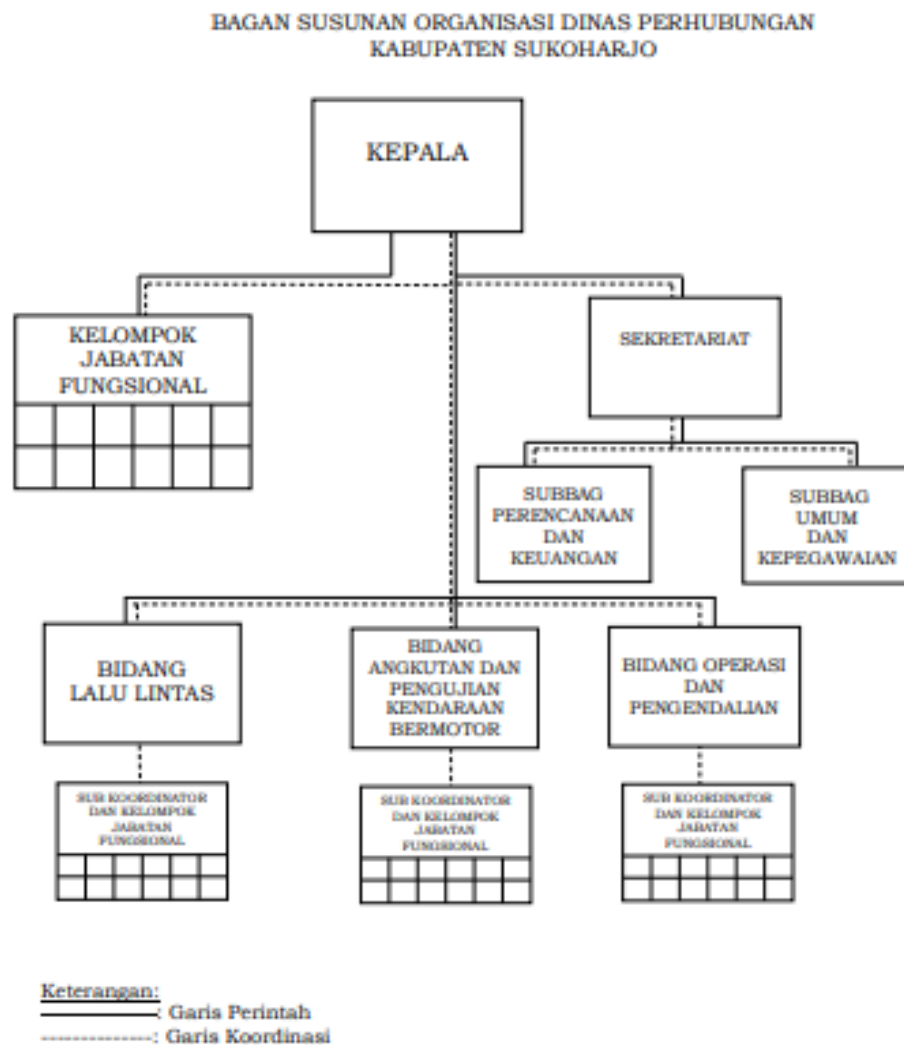
Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



3. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 1 Januari 2025 memiliki komposisi pegawai sejumlah 43 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah Menurut Status :
 - a) PNS (36 Orang)
 - b) CPNS (4 Orang)
 - c) PPPK (3 Orang)
- 2) Jumlah Menurut Stuktur :
 - a) Kepala Dinas (1 Orang)
 - b) Sekretariat (16 Orang)
 - c) Bidang Lalu Lintas (9 Orang)
 - d) Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (12 Orang)
 - e) Bidang Operasi dan Pengendalian (5 Orang)

- 3) Jumlah Menurut Pendidikan :
- a) Pasca Sarjana/S2 (6 Orang)
 - b) Sarjana/S1/D4 (9 Orang)
 - c) Sarjana Muda/D3 (13 Orang)
 - d) SLTA/Sederajat (10 Orang)
 - e) SLTP (2 Orang)
 - f) SD (0 Orang)
- 4) PNS Menurut Golongan :
- a) Golongan IV (6 Orang)
 - b) Golongan III (24 Orang)
 - c) Golongan II (10 Orang)
 - d) Golongan I (- Orang)

4. Sumber Daya Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanannya memiliki sumber daya modal sebagaimana berikut :

Kartu Inventaris Barang

Tabel 1.1 Kartu Inventaris Barang

a. Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	TANAH			2.324.900.000,00
	- Tanah Bangunan Terminal Darat	Desa Kateguhan, Kel Tawang Sari, Kec Tawang Sari	2.800	560.000.000,00
	- Tanah Bangunan Terminal Darat	Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	1.720	860.000.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Bekonang	318	254.400.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Rajawali No.7 Sukoharjo Desa Joho	5.907	450.000.000,00
	- Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Sumbulan Kidul RT 3 RW 13 Makamhaji Kartasura	90	200.500.000,00
TOTAL				2.324.900.000,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

b. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	3.636	27.875.186.704,00
	ALAT BESAR	9	817.696.000,00
	- alat besar darat lainnya lainnya (dst)	1	752.496.000,00
	- Pompa Air	8	65.200.000,00
	KOMPUTER	146	1.180.665.245,00

- Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000,00
- P.C Unit	29	305.558.225,00
- Lap Top	31	365.499.400,00
- Note Book	1	4.620.000,00
- Tablet PC	3	20.950.000,00
- Personal Komputer lainnya	4	121.648.000,00
- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	8.061.120,00
- Speaker Komputer		98.000,00
- Monitor	5	10.135.000,00
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	231.256.500,00
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000,00
- External/ Portable Hardisk	4	3.850.000,00
- Peralatan Personal Komputer lainnya	8	70.222.000,00
- Router	1	850.000,00
- Modem	3	1.650.000,00
- Peralatan Komputer lainnya	2	9.435.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	3	74.000.000,00
- Genset	1	60.000.000,00
- Air Conditioning (AC)	2	14.000.000,00
RAMBU – RAMBU	2.903	18.408.010.944,00
- Traffic Light	355	5.892.043.275,00
- rambu bersuar lainnya (dst)	73	2.331.218.246,00
- Rambu Jalan	899	1.084.313.683,00
- Rambu Papan Tambahan	64	303.494.717,00
- Rambu Cermin	33	167.798.000,00
- Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200,00
- Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	170	288.015.700,00
- Guardrail	43	331.680.000,00
- rambu tidak bersuar lainnya (dst)	857	3.675.394.041,00
- Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	404	4.327.596.082,00
ALAT ANGKUTAN	39	3.562.489.750,00
- Station Wagon	8	1.485.340.250,00
- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000,00
- Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000,00
- Truck + Attachment	1	384.057.500,00
- Sepeda Motor	23	546.360.000,00
- kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000,00
- kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000,00
- Gerobak Tarik	2	5.000.000,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	14	2.042.070.000,00
- perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000,00
- perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000,00
- alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000,00
- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	33.000.000,00
- alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000,00
- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000,00
- Brake Tester	1	898.000.000,00
- alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000,00
ALAT PERTANIAN	5	6.044.000,00
- Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000,00

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	426	1.069.235.715,00
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	2.830.000,00
- Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000,00
- Lemari Besi/Metal	3	13.980.000,00
- Lemari Kayu	13	31.701.375,00
- Rak Besi	4	63.712.000,00
- Filing Cabinet Besi	24	63.565.340,00
- Brandkas	1	16.500.000,00
- Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	4.110.000,00
- Rotary Filing	1	29.800.000,00
- Lemari Kaca	1	3.400.000,00
- CCTV - Camera Control Television System	10	68.725.000,00
- Mesin Absensi	1	6.000.000,00
- Alat Kantor Lainnya	11	49.400.000,00
- Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000,00
- Meja Kerja Kayu	102	88.249.500,00
- Kursi Besi/Metal	4	8.400.000,00
- Sice	2	1.296.000,00
- Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000,00
- Meja Rapat	10	13.900.000,00
- Meja Resepsionis	1	2.450.000,00
- Meja Panjang	5	4.700.000,00
- Kursi Rapat	4	3.900.000,00
- Kursi Tamu	2	4.275.000,00
- Kursi Putar	38	35.020.000,00
- Kursi Biasa	4	8.000.000,00
- Bangku Tunggu	2	4.500.000,00
- Meubeleur lainnya	8	4.500.000,00
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000,00
- Mesin Pemotong Rumput	3	8.250.000,00
- Lemari Es	1	2.430.000,00
- A.C. Window	3	23.700.000,00
- A.C. Split	18	101.285.000,00
- Kipas Angin	3	5.400.000,00
- Exhaust Fan	2	4.000.000,00
- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000,00
- Rice Cooker (Alat Dapur)	1	500.000,00
- Kitchen Set	1	11.000.000,00
- Tabung Gas	1	630.000,00
- Televisi	9	47.449.000,00
- Amplifier	1	550.000,00
- Sound System	2	29.175.000,00
- Wireless	1	9.930.000,00
- Megaphone	3	1.650.000,00
- Microphone	1	4.500.000,00
- Mic Conference	1	1.100.000,00
- Unit Power Supply	13	12.215.000,00
- Camera Video	3	33.400.000,00
- Camera film	1	2.250.000,00
- Tangga Aluminium	1	1.350.000,00
- Dispenser	6	16.325.000,00
- Handy Cam	1	9.800.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	58	88.307.500,00
- Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000,00

- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	9.000.000,00
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000,00
- Meja Tamu Biasa	2	11.050.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	5.550.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.820.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	4.080.000,00
- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	23.362.500,00
- Buffet Kayu	1	13.712.500,00
- Buffet Kaca	1	2.550.000,00
- Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	6.450.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	76	210.454.050,00
- Audio Mixing Portable	2	8.925.000,00
- Microphone/Wireless MIC	4	11.025.000,00
- Camera Electronic	1	9.750.000,00
- Video Caption Adder	1	2.000.000,00
- Layar Film/Projector	1	7.700.000,00
- LCD Monitor	1	1.417.500,00
- Camera Conference	1	18.500.000,00
- Kamera Udara	1	23.250.000,00
- Telephone Mobile	2	6.000.000,00
- Handy Talky (HT)	57	107.346.000,00
- Facsimile	1	2.000.000,00
- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000,00
- Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	4.592.000,00
- alat komunikasi khusus lainnya (dst)	1	1.748.550,00
- alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	1	5.000.000,00
ALAT LABORATORIUM	14	502.846.000,00
- Head Light Tester	1	350.750.000,00
- Diesel Smoke Tester	1	131.200.000,00
- Portable Router	6	16.996.000,00
- Papan Panel	6	3.900.000,00
ALAT PERSENJATAAN	1	1.675.000,00
- Layar Proyektor	1	1.675.000,00
TOTAL	3.636	27.875.186.704,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

c. Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			22.623.393.026,00
	BANGUNAN GEDUNG			22.623.393.026,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Rajawali no. 7 Sukoharjo	277,59	775.868.750,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Rajawali no. 7 Sukoharjo	536,37	462.450.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	28	73.499.000,00

- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	24,5	85.915.500,00
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	37,5	187.805.000,00
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	80,5	190.403.500,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Desa Kadilangu, Kecamatan Baki	7	26.257.000,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo	64	85.658.750,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	24	23.600.000,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	55	94.215.000,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	320,87	203.319.650,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	91,85	104.734.500,00
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Terminal Watukelir Kabupaten Sukoharjo	400,77	158.814.000,00
- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	1.082,22	3.297.105.000,00
- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman		21.292.000,00
- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman (1)		21.296.404,00
- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman (1)		29.459.596,00
- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Slamet Riyadi		21.292.000,00
- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Slamet Riyadi		80.208.000,00
- Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Jl. Jend, Sudirman Sukoharjo	735,07	90.135.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Dishubinfokom Sukoharjo	31,96	52.000.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	50,45	113.214.500,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pasar Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	9	42.868.000,00

- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	17,6	60.500.000,00
- Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Jl Mojo-Sidan	6,45	182.660.000,00
- Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	1.903,74	15.566.096.739,00
- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Underpass Jl Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura		485.664.887,00
- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Jl. Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo	31,5	77.060.250,00
- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Undepass Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura		10.000.000,00
TOTAL			22.623.393.026,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

d. Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	1	10.573.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1	10.573.000,00
	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	10.573.000,00
TOTAL		1	10.573.000,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

e. Aset Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	5	250.891.700,00
	SOFTWARE	4	182.966.700,00
	Software	3	156.798.700,00
	Kajian	1	26.168.000,00
	ASET RUSAK BERAT/USANG	1	67.925.000,00
	Perahu Penyeberangan	1	67.925.000,00
TOTAL		5	250.891.700,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

f. Konstruksi dalam pengerjaan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			9.464.500,00
	RAMBU – RAMBU			9.464.500,00
	Guardrail		0	2.749.000,00
	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)			6.715.500,00
TOTAL				9.464.500,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

g. Jalan irigasi jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			8.383.398.669,00
	INSTALASI			8.383.398.669,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Kabupaten Sukoharjo	0	212.690.833,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Proliman Sukoharjo	0	214.825.834,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Tugu Jamu Gendong Sukoharjo	0	210.810.833,00
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	b. Pengadaan Lampu PJU Lokasi : Jl. Depan Rmh Makan Balai Padi Jl. Skh Bekonang Jl. Istana Kendaraan Gatak	0	134.674.980,00
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Penerangan Jalan Taman Hutan Kota	0	782.463.328,00
-	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Meterisasi PJU	0	84.971.843,00
-	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu Penerangan Alun alun Sukoharjo	0	62.668.657,00
-	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU	0	62.705.853,00
-	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Tenaga Surya	0	125.776.147,00
-	Instalasi gardu listrik lainnya	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Canden-Nglayang, Jalan Bulakrejo-Gentan		148.424.000,00
-	Instalasi gardu listrik lainnya	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Sukoharjo-Pondok, Jalan Ambil Ambil-Tanjung		150.496.000,00
-	Lain-lain	Pengadaan Lampu High Mast Terminal Sukoharjo Lokasi Utara Jembatan Bacem, Grogol, Sukoharjo	0	187.875.000,00
-	Lain-lain	Pengadaan Lampu High Mast Terminal Sukoharjo Lokasi Terminal Skh	0	187.555.000,00

-	Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Lokasi Jl. Bulakrejo-Gentan, Taman Pakujoyo dan Jl. Calen, Sukoharjo	0	79.869.000,00
-	Lain-lain	Tiang PJU Ruas Jl. Diponegoro Kartasura 51 buah	0	365.766.861,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain		0	1.139.846.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pemasangan Lampu High Mast dan Lampu Sorot Lokasi Pertigaan Kejaksaan Dan Patung Ir. Sukarno Solobaru	0	202.450.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Sanggung-Gatak Kec. Gatak	0	148.900.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jl. Slamet Riyadi Kec. Kartasura	0	134.900.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Untuk Jalan Poros Desa, Desa Kertonatan	0	46.000.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Lokasi Jalan Baki-Gentan dan Dekat Jembatan Pondok	0	163.037.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Tenaga Surya Lokasi Jalan Desa Kedungsono Kec. Bulu	0	130.930.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Sukoharjo	0	2.705.395.000,00
-	Jaringan listrik lainnya	Jaringan Listrik Underpass Makam Haji		90.250.000,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Blimbing – Makamhaji	0	146.687.700,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tegalan - Mangkuyudan	0	98.611.500,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan Lampu Jalan Gentan-Pecinan dan Jalan Langkap Sanggang	0	364.817.300,00
TOTAL				8.383.398.669,00

C. Penghargaan

Di tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan WTN dan Hub Awards. Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Replublik Indonesian Kepada Propinsi, Kota/Kabupaten yang dinilai berprestasi dalam menyelenggarakan transportasi perkotaan dan fasilitas publik dengan baik. Dalam hal ini peran Bupati Sukoharjo sangatlah penting, karena memberikan perhatian dan dukungan terhadap Sistem transportasi berkelanjutan dengan Memprioritaskan kegiatan transportasi pubik. Penilaian WTN 2024 melingkupi beberapa kriteria, yaitu Lalu lintas, Angkutan, Sarana transportasi Darat, Prasarana Darat, dan Bidang Umum. Piala WTN diberikan kepada 5 Kota besar dan 10 kota sedang dan 20 kota kecil, sedang yang lainnya hanya mendapatkan sertifikat.



Piala WTN



Penyerahan Piala WTN oleh Menteri Perhubungan



Piagam Penghargaan WTN



Penyerahan Piagam Penghargaan Hub Award



Piagam Penghargaan Hub Award

D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2024, antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun dilokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi penggunaan angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarananya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya

menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Bupati Sukoharjo

Bupati Sukoharjo menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang maju, aman, konstitusional, mantap, unggul dan rapi. Adapun visi pembangunan Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”

Penjabaraan Visi tersebut telah diuraikan dalam di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Penjabaran	Indikator
(1)	(2)	(3)
Maju	Maju merupakan pelaksanaan pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks pembangunan manusia; ✓ Pertumbuhan ekonomi; ✓ Indeks pembangunan infrastruktur.
Aman	Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara individu dan kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketahanan daerah/ indeks resiko bencana.
Konstitusional	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks reformasi birokrasi.
Mantap	Warga masyarakat dan segenap penyelenggara Pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat pengangguran terbuka; ✓ Pendapatan perkapita; ✓ Angka kemiskinan.
Unggul	Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketentraman masyarakat.
Rapi	Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib dan beres.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IKLH.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Keadilan Sosial dan Keagamaan.

Dalam misi ke-4 “Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan” terdapat keterkaitan yang erat dengan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur berkelanjutan yaitu peningkatan infrastruktur yang termodernisasikan sesuai dengan perkembangan era digitalisasi di masa sekarang dan di masa depan yang hadir di masyarakat dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perekonomian kerakyatan. Peningkatan infrastruktur dilakukan bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan serta keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya misi tersebut didukung oleh tujuan pertama dari misi ke 4 (empat) **“Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan”** dengan indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (IPI) kemudian didukung oleh sasaran pertama dari tujuan pertama dalam misi ke 4 (empat) **“Meningkatnya kualitas infrastruktur”** dengan indikator kinerja indeks fatalitas. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tupoksi Dinas Perhubungan adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, maksudnya seperti penyediaan traffic light, ATCS, warning light, pelican crossing, cermin tikung, guardrill, marka jalan, shelter, halte, terminal, alat uji kendaraan bermotor serta rambu keselamatan jalan lainnya. Dengan penyediaan insfrastuktur perhubungan yang semakin lengkap dan termodernisasikan diharapkan rasio angka fatalitas kecelakaan sektor perhubungan yang menjadi target tujuan Renstra Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat selalu ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya, serta Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo yang menjadi indikator kinerja tujuan dari misi ke 4 (empat) RPJMD akan semakin meningkat serta Indeks Fatalitas yang menjadi sasaran dari tujuan RPJMD tersebut akan semakin menurun.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor	Persen	0,03	0,310	0,31	0,195	0,190	0,185	0,180
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,52	2,00	1,5	0,9	0,85	0,75	0,5
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19,81	26,5	26	19	18,5	18	17,5
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75,86	63	66	70	75	77	79

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 IKU dan Sumber Data

TUJUAN	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
	Nilai SAKIP	Angka	Inspektorat Daerah

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024:

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0.190
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0.85
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan Bupati

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0.85
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75

Sedangkan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	9.005.090.724,00
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.180.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	40.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	44.180.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.759.806.700,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	5.442.993.000,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	296.813.700,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	570.600.000,00
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	163 paket	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156 orang	110.200.000,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	129 orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 orang	460.400.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	679.791.800,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	26.400.000,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	136.916.545,00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	40.000.000,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	215.148.455,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	80.000.000,00
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	5.500.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	175.826.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	216.793.000,00
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	200.000.000,00
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	16.793.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.048.424.224,00
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	326.930.000,00
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.655.000,00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.839.224,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	645.495.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	38 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	36 unit	318.000.000,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	305.495.000,00
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	22.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	71,50 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	71,20 %	41.294.857.967,00
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	11,49%		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	11%	
		Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	85%		Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	84%	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	515.320.000,00
25	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 dokumen	515.320.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	37.041.236.922,00
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	60 unit	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 unit	194.000.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3489 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3512 unit	35.632.116.922,00
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1537 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1411 unit	666.785.000,00
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	8650 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7829 unit	548.335.000,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	573.669.104,00
30	pembangunan terminal/ shelter/ halte	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	6 unit	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	9 unit	215.000.000,00
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 unit	358.669.104,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	217.676.000,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	217.676.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	687.895.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	34.550.000,00
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	615.345.000,00
35	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	20.000.000,00
36	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	18.000.000,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	652.500.000,00
37	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	155 unit	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 dokumen	603.500.000,00
38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	49.000.000,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	44.428.541,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	11 Laporan	44.428.541,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	1.187.015.200,00
40	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	460.071.800,00
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	726.943.400,00
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	286.700.000,00
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	256.700.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	30.000.000,00
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	31.200.000,00
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	31.200.000,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	57.217.200,00
45	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Unit	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	34.900.000,00

NO	SEBELUM			SESUDAH			ANGGARAN Rp.
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	22.317.200,00
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	100%	750.164.000,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	750.164.000,00
47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	750.164.000,00
TOTAL ANGGARAN							51.050.112.691,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Lampiran II berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan menu dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seterusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan sudah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama, adapun capaian Tahun 2024 sebagai berikut:

A.1. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

A.1.1. Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Tabel 3.1 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0,190	0,03	184,21%

Dari tabel di atas dapat diketahui tujuan kinerja Dinas Perhubungan yang diukur dengan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dapat tercapai. Realisasi di tahun 2024 sebesar 0,03% dari target 0,195% atau sebesar 184,21%. Berikut tabel kejadian kecelakaan dan korban meninggal dunia terkait peran dishub:

Tabel 3.2 Kejadian Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia terkait Peran Dishub

Tahun 2024	Kejadian Laka			Total Laka	Korban MD
	Faktor Sarana	Faktor Prasarana			
		Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan		
Jan	-	18	2	20	0
Feb	-	18	3	21	0
Mar	-	7	4	11	0
Apr	1	17	6	24	0
Mei	-	27	4	32	2
Jun	-	23	1	24	1
Jul	1	11	3	15	2
Agt	-	26	3	29	0
Sep	2	25	9	36	0
Okt	2	16	4	22	1
Nov	1	27	5	33	1
Des	1	32	8	41	2
Jumlah				308	9

(Sumber : Hasil Analisis, 2024)

Perhitungan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia di karenakan Faktor Perhubungan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 tahun}} = \frac{9}{308} \times 100\% = 0,03\%$$

A.1.2. Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0.190	0,03	184,21%
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,85	0	200,00%
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5	16,9	108,65%
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75	75,86	101,15%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dapat mencapai target yaitu 200%. Dari faktor sarana ini, Dinas Perhubungan berperan serta dengan kegiatan pengecekan rutin kendaraan angkutan barang dan penumpang (uji kendaraan *keur*). Pada Tahun 2024 ditemukan 0 kejadian kecelakaan akibat kerusakan pada kendaraan namun kejadian tersebut dialami oleh pengguna kendaraan pribadi sehingga tidak terkait dengan Dishub. Formula perhitungan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya)}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\% = \frac{0}{1514} = 200\%$$

Selain itu, dari tabel di atas dapat diketahui tingkat Presentase angka kecelakaan prasarana transportasi dapat mencapai target yaitu sebesar 16,9% dari target 18,5% atau sebesar 108,65% capaiannya. Dalam hal ini Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan berupa pemasangan perlengkapan jalan yaitu marka dan penerangan jalan di ruas jalan kabupaten. Berikut tabel kejadian kecelakaan Faktor Prasarana:

Tabel 3.4 Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana

Tahun 2024	Kejadian Laka Faktor Prasarana		Total Laka
	Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan	
Jan	18	2	20
Feb	18	3	21
Mar	7	4	11
Apr	17	6	23
Mei	27	4	32
Jun	23	1	24
Jul	11	3	14
Agt	26	3	29
Sep	25	9	34
Okt	11	4	15
Nov	12	4	16
Des	13	4	17
Jumlah			256

(Sumber : Hasil Analisis, 2024)

Formula perhitungan Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasarana Transportasi (Fasilitas Jalan)}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$
$$= \frac{256}{1514} \times 100\% = 16,9\%$$

Dilain sisi tingkat capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 untuk Capaian SAKIP 2023 mencapai target yaitu sebesar 75,86 dari target yang telah ditetapkan yaitu 75.

1. Capaian Perjanjian Kinerja 2024

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,85	0	200,00%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5	16,9	108,65%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75	75,86	101,15%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Realisasi Sasaran Strategis dalam perjanjian kinerja sebagai berikut, Pertama yaitu Meningkatkan kinerja sarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dapat mencapai target sebesar 0% atau sebesar 200% prosentasenya. Kedua Meningkatkan kinerja Prasarana transportasi diukur dengan indikator Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi mencapai target yaitu sebesar 16,9% atau sebesar 108,65% prosentasenya. Dan Capaian realisasi SAKIP untuk Tahun 2023 yang keluar di tahun 2024 dapat mencapai target yaitu sebesar 75,86 atau sebesar 101,15%.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

A.2.1 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024

Tabel 3.6 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor	Persen	0,31	0,05	0,022	0,03

Dari tabel di atas dapat diketahui Tujuan Renstra yaitu Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik dengan indikator Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami penurunan secara angka. Akan tetapi secara kualitas bisa dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan tercapai dikarenakan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan menurun dari tahun ke 2021 sampai 2024 yaitu di tahun 2021 sebesar 0,310, tahun 2022 sebesar 0,05, tahun 2023 sebesar 0,022 dan di tahun 2024 sebesar 0,03.

A.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

Tabel 3.7 Capaian Indikator IKU Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor	Persen	0,31	0,05	0,022	0,03
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,088	0,9	0,00	0
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	8,19	19	11,98	16,9
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	68	72,96	65,44	75,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase angka kecelakaan sarana transportasi ditahun 2023 dan 2024 paling rendah, hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2023 dan 2024 tidak ada kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia disebabkan karena sarana transportasi. Akan tetapi di tahun 2022 Persentase angka kecelakaan sarana transportasi tertinggi dari tahun 2021 dan 2024 yaitu sebesar 0,9%, sedangkan tahun 2024 persentase angka kecelakan sarana sebesar 0%. Selanjutnya Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 sebesar 8,19%, tahun 2022 sebesar 19%, ditahun 2023 sebesar 11,98% dan di tahun 2024 sebesar 16,9%. Dan Indikator Kinerja Utama terakhir yang berkaitan dengan sekretariat yaitu Nilai SAKIP dengan hasil dari tahun 2021 sampai 2024 juga mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 68, tahun 2022 sebesar 72,96, di tahun 2023 sebesar 65,44 dan di tahun 2024 sebesar 75,86.

A.2.3 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2024

Tabel 3.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,088	0,9	0,00	0
Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	8,19	19	11,98	16,9
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	68	72,96	65,44	75,86

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif.

- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif.
- c. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga yaitu Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif.

A.3. Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

A.3.1. Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.9 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA 2024	PROSENTASE CAPAIAN TH 2024 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0,18	0,03	183,33%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pertama Renstra yang diukur dengan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan terhadap Target akhir Renstra sebesar 183,33%. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan. Formula capaian tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Prosentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\
 & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0,18 - (0,03 - 0,18)}{0,18} \times 100\% = 183,33\%
 \end{aligned}$$

A.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.10 Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA 2024	PROSENTASE CAPAIAN TH 2024 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor	Persen	0,18	0,03	183,33%
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,5	0	200,00%
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	17,5	16,9	103,43%
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	79	75,86	96,03%

Dari tabel di atas dapat diketahui Realisasi Indikator Kinerja Utama terhadap capaian akhir Renstra sebagai berikut:

- a. Persentase capaian angka kecelakaan sarana transportasi tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 200% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 0%, dan target di akhir renstra sebesar 0.5%. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Prosentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0.5 - (0 - 0.5)}{0.5} \times 100\% = 200\% \end{aligned}$$

- b. Persentase capaian angka kecelakaan prasarana transportasi tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 103% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 16,9%, dan target di akhir renstra sebesar 17,5%. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Prosentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{17.5 - (16,9 - 17.5)}{17.5} \times 100\% = 103,43\% \end{aligned}$$

- c. Persentase capaian NILAI SAKIP tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 96% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 75,86, dan target di akhir renstra sebesar 79. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Prosentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{75,86}{79} \times 100\% = 96,03\% \end{aligned}$$

A.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.11 Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA 2024	PROSENTASE CAPAIAN TH 2024 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,5	0	200,00%
Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	17,5	16,9	103,43%
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	79	75,86	96,03%

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama terhadap target akhir renstra dengan indikator Persentase angka kecelakaan sarana sebesar 200%.
- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis kedua terhadap target akhir renstra dengan indikator Persentase angka kecelakaan prasarana sebesar 103,43%.
- c. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga terhadap target akhir renstra dengan indikator Nilai SAKIP 2024 sebesar 96,03%.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN THP TARGET AKHIR RENSTRA	FAKTOR PENYEBAB		SOLUSI YANG DILAKUKAN
					2024			KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0,19	0,03	183,33%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan 2. Sudah tersedianya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan 3. Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan 4. Sinergitas antar Instansi vertikal 5. Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin 6. Terlaksananya sosialisasi keselamatan kepada masyarakat	-	1. Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan
		Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,85	0	200%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan 2. Tersedianya Sarana Kelengkapan Jalan 3. Terlaksananya pelayanan Uji KIR 4. Terlaksananya Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji 5. Terlaksananya Sosialisasi terhadap bengkel angkutan umum. 6. Terlaksananya sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor	1. Bertambahnya mobilitas masyarakat	1. Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN THP TARGET AKHIR RENSTRA	FAKTOR PENYEBAB		SOLUSI YANG DILAKUKAN
					2024			KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								7. Terlaksananya uji petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji. 8. Terlaksananya Pemilihan Adyaksa Teladan 9. Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan 10. Sinergitas antar Instansi vertikal 11. Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin		
		Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5	16,9	108,65%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan 2. Sudah tersedianya Prasarana dan Perlengkapan Jalan 3. Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan 4. Terpeliharanya prasarana dan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten. 5. Sinergitas antar Instansi vertikal 6. Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin 7. Terlaksananya sosialisasi keselamatan kepada masyarakat	1. Bertambahnya mobilitas masyarakat	1. Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN THP TARGET AKHIR RENSTRA	FAKTOR PENYEBAB		SOLUSI YANG DILAKUKAN
					2024			KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75	75,86	101%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP 2. Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah 3. Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan 4. Sinergitas antar Perangkat Daerah 5. Tersedianya anggaran untuk mencapai target 6. Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin 7. Terupdatenya dokumen perangkat daerah di media sosial	1. Belum optimalnya pendokumentasian kinerja dinas perhubungan melalui media sosial	1. Terlaksananya Evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang harus didokumentasikan melalui web resmi maupun melalui social media

Dari tabel di atas dapat diketahui factor keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis diantaranya:

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi:

a. Tersedianya halte di berbagai ruas Jalan Kabupaten.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan telah menyediakan halte sebesar 9 unit yang tersebar di 9 titik lokasi Jalan Kabupaten. Dari ke 9 halte tersebut terdiri dari 6 Halte Kecil terletak di kantor pos mojolaban, pasar mojolaban, lapangan cangkol, SMP N 1 mojolaban, SMA CT Arsa, Rs Nirmala suri Serta 3 Halte besar terletak di Polsek Mojolaban, Simpang Sidan, RS Nirmala Suri. Hal ini sangat berperan dalam mencapai sasaran strategis.





Gambar 1 9 titik Halte Pengadaan Tahun 2024

b. Terlaksananya pelayanan Uji KIR.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan dan diberikan Tanda Lulus Uji. Pelayanan uji KIR oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Pelayanan uji KIR ini menguji seluruh kendaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau angkutan barang. Pelayanan Uji KIR menguji diantaranya fungsi lampu-lampu dan daya pancarnya, emisi gas buang, tingkat kebisingan kendaraan, keakuratan sistem kemudi, aki-kaki mobil, akurasi speedometer, sistem pengereman, sistem rem parkir, dan kedalaman alur ban mobil. Di tahun 2024 sebanyak 9433 kendaraan yang telah uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Berikut pelayanan Uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 2 Pelayanan Uji KIR

- c. Terlaksananya Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan agar wajib uji sadar pentingnya uji KIR. Dikarenakan bagi pemilik kendaraan wajib uji atau perusahaan jasa angkutan orang maupun barang diwajibkan untuk mengujikan kendaraannya secara berkala selama 6 bulan sekali. Sosialisasi ini telah dilaksanakan salah satu tujuannya yaitu menekan tingkat kecelakaan kendaraan wajib uji.



Gambar 3 Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

- d. Terlaksananya sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor
- Kemampuan bengkel untuk melakukan peningkatan kualitas serta mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang merupakan sebuah kunci yang harus dimiliki untuk menghadapi persaingan antar bengkel. Peningkatan kinerja bisa dicapai dengan beberapa cara antara lain dengan meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan efisiensi kerja dapat tercapai apabila suatu usaha memiliki sumber daya manusia yang dapat bekerja secara produktif dengan aman, nyaman, dan sehat tanpa adanya gangguan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan sosialisasi terhadap pemilik bengkel umum kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan agar kualitas sumber daya dalam memberikan pelayanan jasa perbengkelan semakin baik. Hal ini berimbas dengan keselamatan kendaraan di jalan yang dapat berpengaruh dengan kecelakaan.



Gambar 4 Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor

- e. Terlaksananya Uji Petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji.
- Kegiatan uji petik telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan berkolaborasi Satlantas Polres Sukoharjo. Kegiatan ini dilakukan untuk inspeksi kepada kendaraan bermotor khususnya angkutan orang maupun barang yang melintas dan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dengan jadwal dan hasil sebagai berikut:

1. Tanggal pelaksanaan : 16 April 2024
Tempat : Terminal Sukoharjo
Personil : Dinas Perhubungan (20 orang), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2 Orang), Kepolisian Polres Sukoharjo (3 Orang).
- Hasil Pemeriksaan : Kendaraan yang diperiksa berjumlah 43 Dan pelanggaran terdapat 4 kendaraan dengan jenis pelanggaran ringan berupa keterlambatan uji



Gambar 5 Persiapan Apel Uji Petik



Gambar 6 Pelaksanaan Uji Petik

f. Pemilihan Abi yaksa Teladan

Pemilihan abdi yasa teladan ini merupakan upaya untuk menciptakan kesadaran bagi pengemudi angkutan tentang pentingnya kesepakatan dan tata tertib lalu lintas. Harapannya dalam berlalu lintas pengemudi mengutamakan keselamatan kendaraan yang dibawanya baik itu keselamatan penumpang maupun dirinya sendiri. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 4 Juli 2024 bertempat di aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadiri oleh organda Makmur Jalur 1, 2, 3, 4 ,7, dan Organda Makmur Jalur Watu Kelir serta abdi yasa dari berbagai perusahaan angkutan umum. Dari pemelihan tersebut adapun perolehan skor pemenang sebagai berikut:

Tabel 3.13 Skor Pemenang Abdi Yasa

No.	Nama	Perusahaan	Skor
1.	Muh. Chuzaini	PT. Wahyu Taksi	445
2.	Eka Budi Utama	PT Fauziyah Elfas Brilian	441
3.	Joko Muryanto	PT Gunung Mulia	438
4.	Suratman	Koperasi Organda Makmur	429
5.	Iis Harry	PT Eltrina Ridho Illahi	428
6.	Riyadi	PT Putra Agung Sedayu	427

Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan mencapai sasaran strategis, diharapkan dengan kegiatan ini abdi yasa termotivasi untuk tetap berhati-hati dalam mengemudi kendaraan di jalan.



Gambar 7 Pemilihan Abdi Yasa



Gambar 8 Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba

2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi

a. Tersedianya Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Penyediaan prasarana jalan di tahun 2024 yaitu Guard Rail Beam sebanyak 28 unit yang terpasang di Desa Sanggang, Bulu. Pembangunan ini erat kaitannya dalam mencapai sasaran strategis. Dikarenakan dengan adanya guard rail beam tidak ada kecelakaan yang meninggal dunia dikarenakan pembatas jalan tidak terpasang.

NO.	0%	50%	100%
1			
2			

Gambar 9 Pemasangan Guard Rail Beam di Desa Sanggang

Disisi lain penyediaan perlengkapan jalan sangat erat kaitannya dengan penerangan jalan. Sampai tahun 2024 Dinas perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menyediakan 3.512 unit perlengkapan Jalan. Di Tahun 2024 terdapat penambahan tiang penerangan jalan umum antara lain:

- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Telukan - Pasar Cuplik
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Mulur - Bancaan
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Tanjunganom - Daleman
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Sidan - Triyagan
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Tinggen – Stasiun Gawok
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Wirun – Palur
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Blimbing – Sanggung
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Mulur - Cabean
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Gentan – Bekonang
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Ngasinan – Bulu
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas JalanTawang Sari – Bulu
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Dalangan –Lengking
- Tiang Lampu Oktagonal Galvanis sebanyak 19 unit (Jalan Rajawali



Gambar 10 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Telukan - Pasar Cuplik



Gambar 11 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Mulur - Bancaan



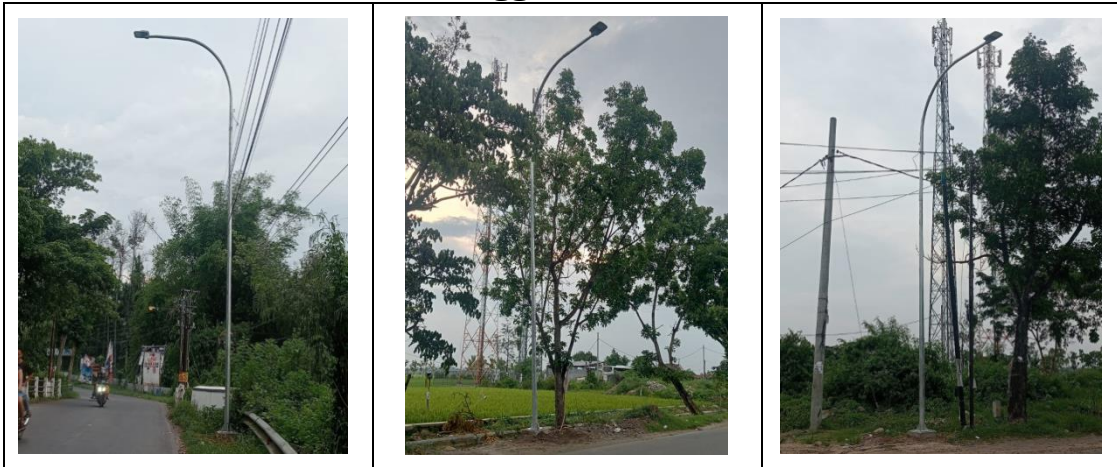
Gambar 12 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tanjunganom -Daleman



Gambar 13 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Sidan - Triyagan



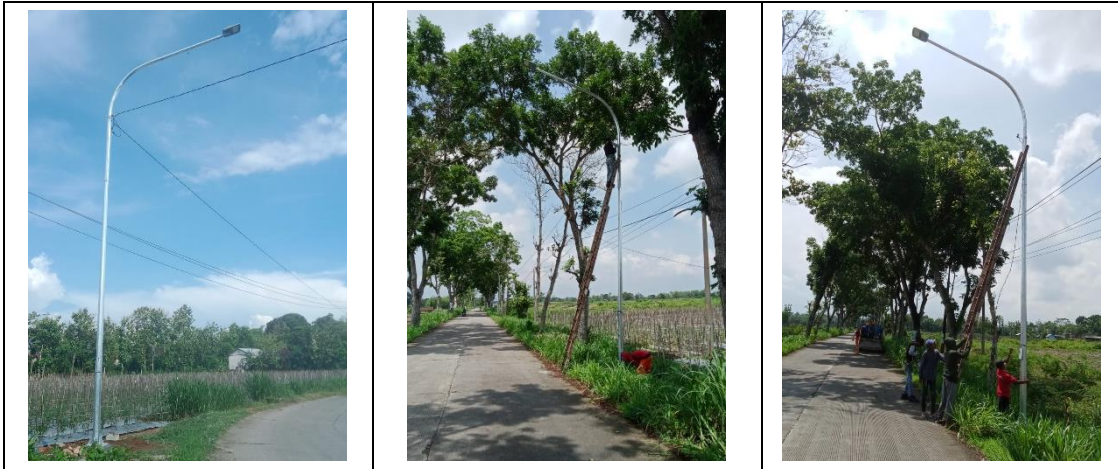
Gambar 14 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tinggen - Stasiun Gawok



Gambar 15 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Wirun - Palur



Gambar 16 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Blimbing - Sanggung



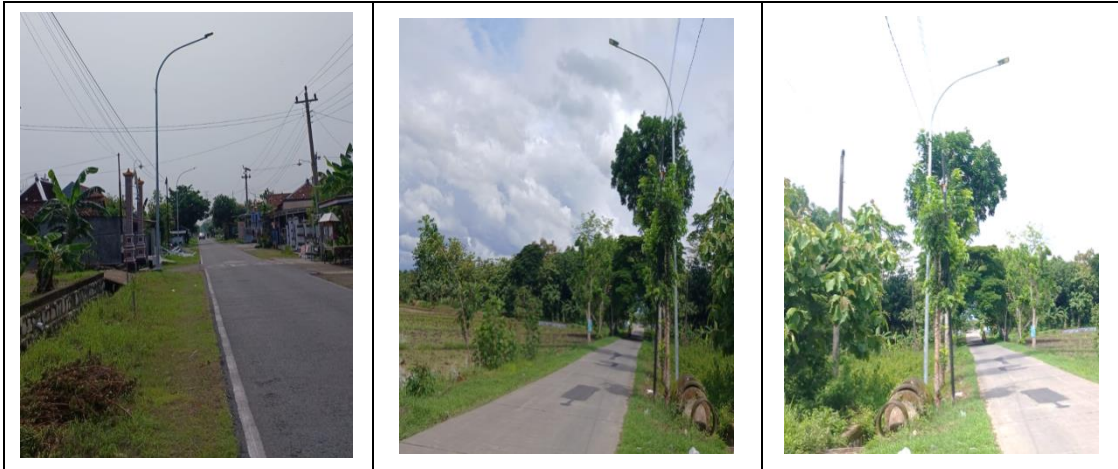
Gambar 17 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Mulur - Cabean



Gambar 18 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Gentan - Bekonang



Gambar 19 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Ngasinan - Bulu



Gambar 20 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Tawangsari - Bulu



Gambar 21 Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter di Ruas Jalan Dalangan -Lengking

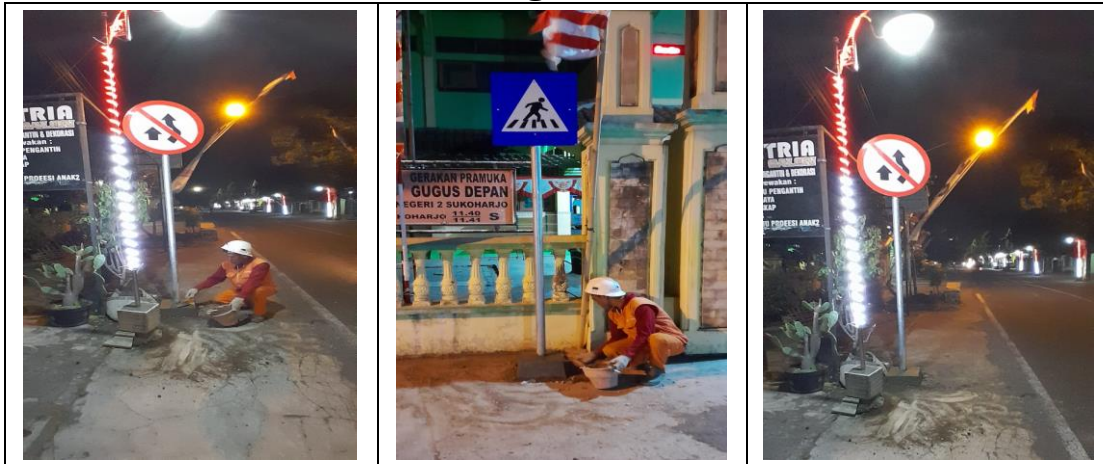


Gambar 22 Tiang Lampu Oktagonal Galvanis 9Meter

Tidak hanya itu di tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan Rambu Perlengkapan Jalan Sebanyak 105 unit. Rambu- rambu tersebut terpasang secara menyebar diberbagai titik lokasi sebagai berikut:



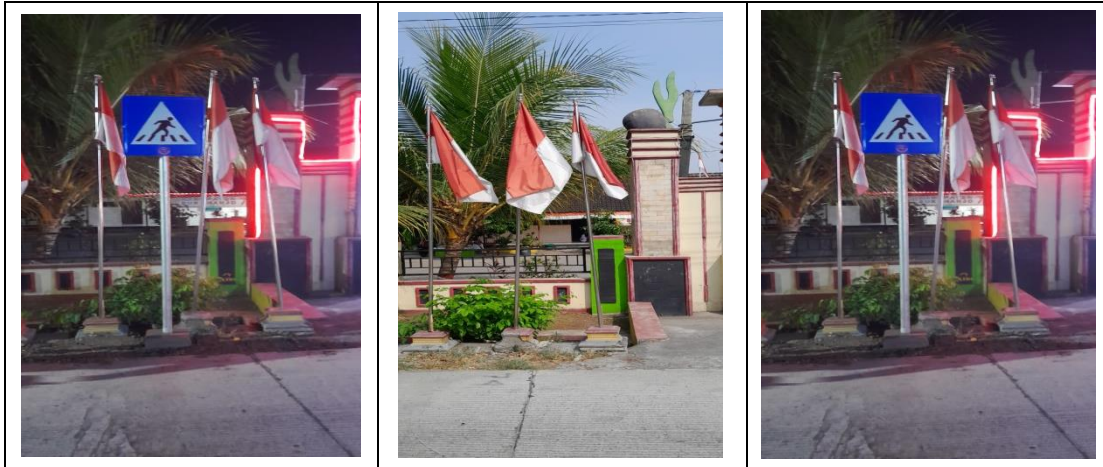
Gambar 23 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Gunung Slamet



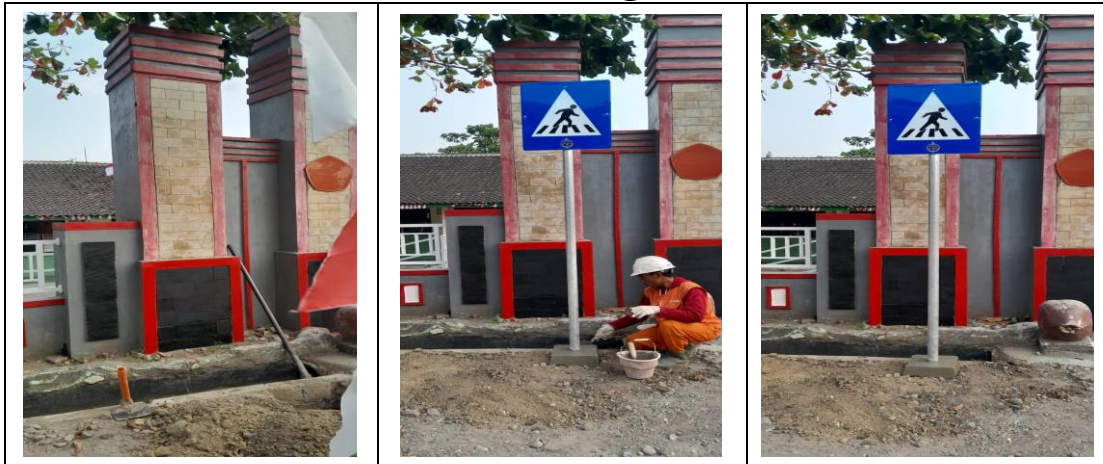
Gambar 24 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kh. Agus Salim



Gambar 25 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan kh. Samanhudi



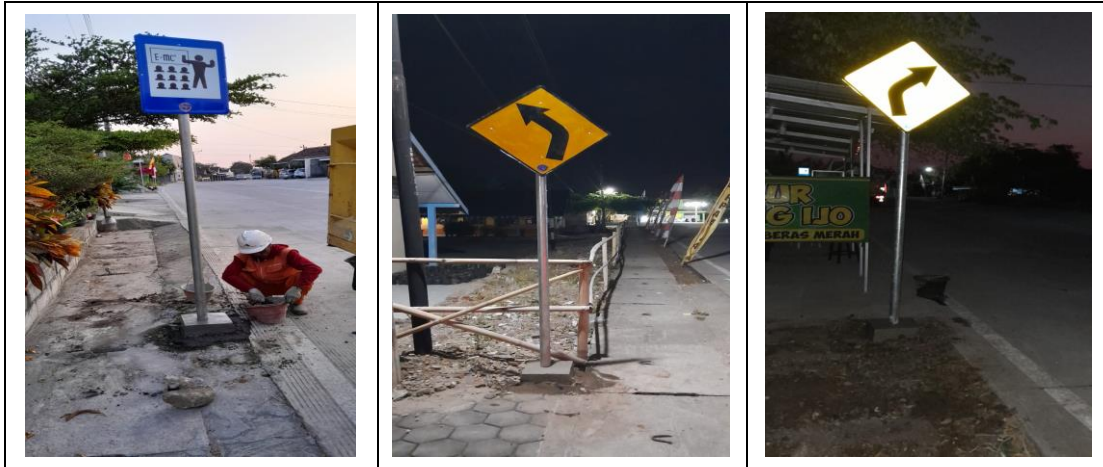
Gambar 26 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Gentan - Bekonang



Gambar 27 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Glondongan - Tugu



Gambar 28 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Mulur - Sidan



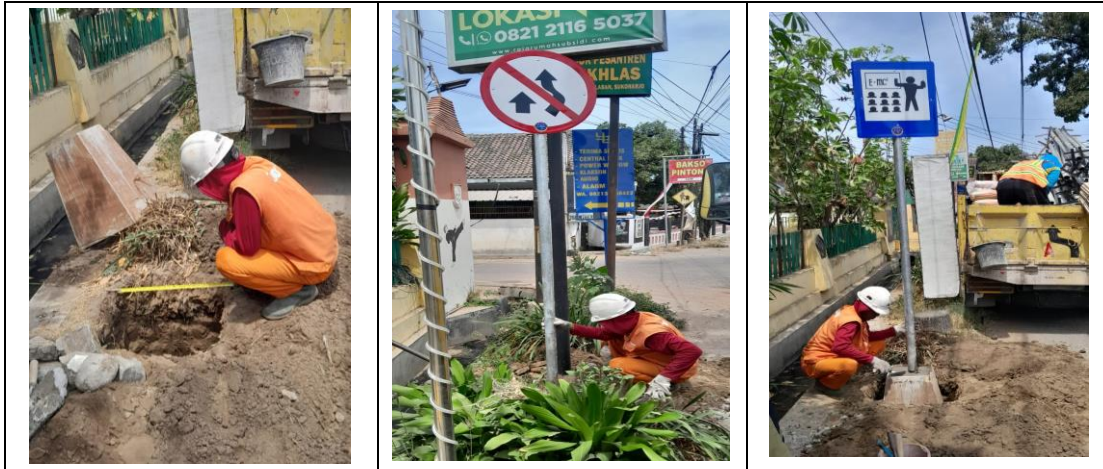
Gambar 29 Gambar. Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Sugihan - Bendosari



Gambar 30 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bekonang - Kayuapak



Gambar 31 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bekonang - Mojo



Gambar 32 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Wirun - Palur



Gambar 33 Rambu Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bendosari

b. Terselenggaranya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Sukoharjo khususnya pelajar. Sosialisasi sangat berperan dalam menekan kecelakaan di Sukoharjo. Di tahun 2024 Dinas Perhubungan telah melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan jadwal seperti jadwal dibawah ini :

Tabel 3.14 Jadwal Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2024

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1.	20 Februari 2024	SMA N 1 MOJOLABAN
2.	21 Februari 2024	SMA N 1 WERU
3.	22 Februari 2024	SMP N 1 BENDOSARI
4.	28 Februari 2024	TK IMAM SUHODO POLOKARTO
5.	30 April 2024	SMP N 1 MOJOLABAN
6.	07 Mei 2024	MTS N 3 BENDOSARI
7.	14 Mei 2024	SMP ISLAM AL HADI MOJOLABAN

8.	28 Mei 2024	SMP N 2 MOJOLABAN
9.	30 Mei 2024	SMP N 3 MOJOLABAN
10.	12 Juni 2024	SMP N 3 GROGOL
11.	14 Juni 2024	SMP KRAGILAN MOJOLABAN
12.	19 Juni 2024	SD N 4 WIRUN
13.	23 Juli 2024	SD MUTIARA INSAN
14.	25 Juli 2024	SMA AL-AZHAR SOLOBARU
15.	26 Juli 2024	SMP N 1 SUKOHARJO
16.	30 Juli 2024	SMP N 2 SUKOHARJO
17.	01 Agustus 2024	SMP N 3 SUKOHARJO
18.	06 September 2024	SMP N 2 BULU
19.	10 September 2024	SMP N 1 BULU



Gambar 34 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA N 1 Mojolaban



Gambar 35 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA N 1 Weru



Gambar 36 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Bendosari



Gambar 37 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di Taman Pakujoyo



Gambar 38 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Mojolaban



Gambar 39 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di MTS N 3 Bendosari



Gambar 40 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban



Gambar 41 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 Mojolaban



Gambar 42 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Mojolaban



Gambar 43 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Grogol



Gambar 44 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD N 4 Wirun



Gambar 45 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD Mutiara Insan



Gambar 46 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMA Al-Ahzar Solobaru



Gambar 47 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Sukoharjo



Gambar 48 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 Sukoharjo



Gambar 49 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 3 Sukoharjo



Gambar 50 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 2 & 3 Bulu

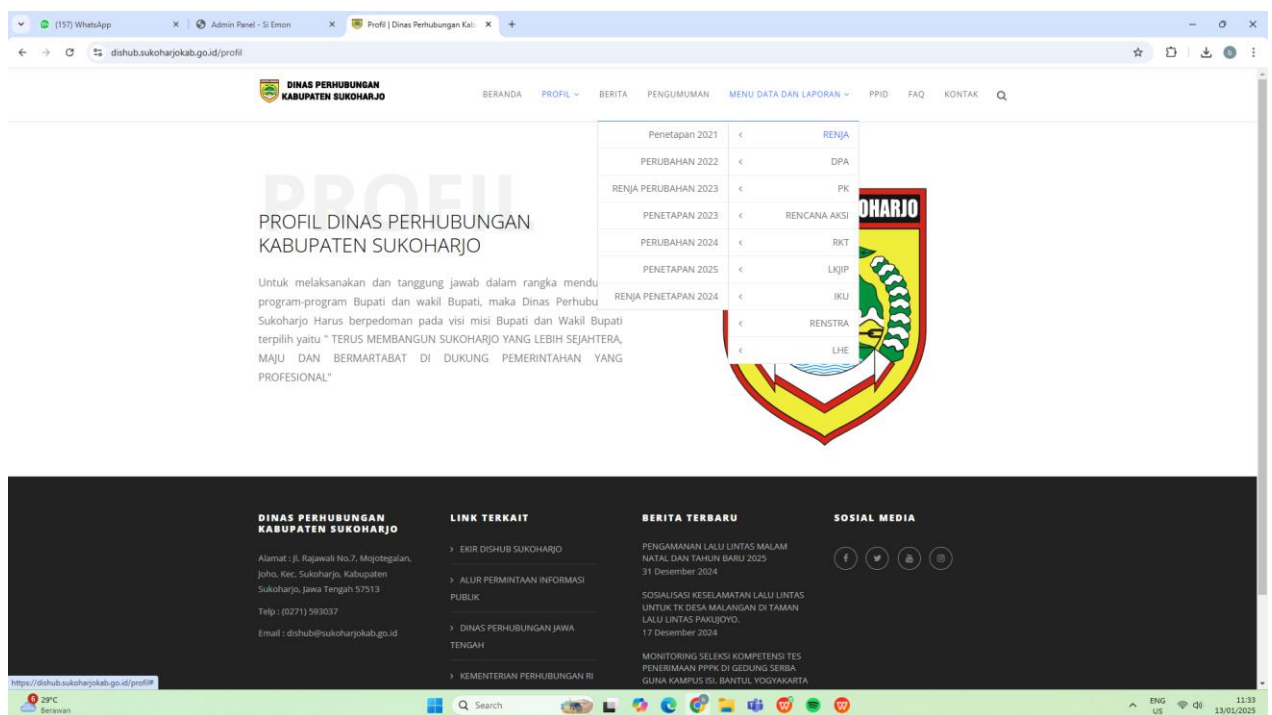


Gambar 51 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP N 1 Bulu

3. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public diukur dengan NILAI SAKIP, dimana nilai SAKIP OPD dinilai oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan satu tahun berikutnya. NILAI SAKIP yang kami sajikan yaitu berdasarkan hasil kinerja di tahun 2024. Dinas Perhubungan telah berupaya untuk meningkatkan kinerja seperti :

1. Tersedianya dokumen perangkat daerah, yang berisi Dokumen Renja, Renja Perubahan RKA, DPA, Perjanjian Kinerja serta dokumen pendukung lainnya yang legal dan sah.
2. Terlaksanya dokumen perangkat daerah yang terkiri dan di update di media social.



Gambar 52 Gambar Pendokumentasian Dokumen Perencanaan Daerah

A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024:

Tabel 3.15 Tabel efisiensi penggunaan sumber daya untuk Mencapai Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024			ANGGARAN 2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,85	0	200%	2.250.027.400	2.104.597.346	93,54%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5	16,9	109%	39.794.994.567	38.731.847.762	97,33%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75	75,86	101%	9.005.090.724	7.837.572.198	87,03%
TOTAL							51.050.112.691	48.674.017.306	95,35%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Sukoharjo Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik namun ada satu sasaran strategis meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public sedikit ketidakefisiensian antara perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang dilaksanakan. Perlunya peningkatan indikator kinerja dan evaluasi alokasi anggaran.

a. Analisis Sumberdaya Manusia

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengalami pengurangan sejumlah 5 Orang pegawai dikarenakan 3 Orang melewati masa pensiun dan 3 Orang mengalami mutasi. Namun pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo juga menerima CPNS baru sebanyak 4 Orang. Dari Sumber daya manusia (SDM) digunakan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas utamanya dalam bidang penelitian sehingga kegiatan dapat berjalan secara optimal, lancar dan efisien.

b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.

c. Anggaran

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kinerja sarana transportasi, meningkatnya kinerja prasarana transportasi, meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik yang diukur melalui indikator persentase angka kecelakaan sarana transportasi, persentase angka kecelakaan prasarana transportasi, nilai SAKIP, pada Tahun 2024 telah disediakan anggaran melalui APBD Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 51.050.112.691 untuk 3 (Tiga) Program yaitu:

- 1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3) Program Program Pengelolaan Perkeretaapian

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 51.050.112.691 terealisasi Rp. 48.674.017.306 atau 95,35%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.376.095.385 (4,65%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sisa pengadaan barang dan jasa, dan Sisa belanja jasa pelayanan umum kantor yang disebabkan oleh tinggi standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Disisi lain efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan memanfaatkan penerimaan Hibah untuk mengurangi penggunaan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh sarana dan prasarana jalan. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima Hibah barang yang di

Kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung pencapaian kinerja sebesar Rp. 672.122.844, antara lain penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi an. Kementrian ESDM berupa PJU Tenaga Surya sejumlah 39 unit dengan jumlah nominal Rp. 600.167.844 dan penerimaan hibah dari PT. BPR Bank Sukoharjo Perseroda, PT Gujati, dan Bank Jateng Cabang Sukoharjo sejumlah 3 unit dengan total nominal Rp. 71.955.000.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100,00%	9.005.090.724,00	7.837.627.198,00	87,04%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>104%</i>	<i>104,00%</i>	<i>84.180.000,00</i>	<i>81.902.800,00</i>	<i>97,29%</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7 dokumen	140,00%	40.000.000,00	38.166.800,00	95,42%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	44.180.000,00	43.736.000,00	99,00%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.759.806.700,00</i>	<i>4.972.028.396,00</i>	<i>86,32%</i>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	42 orang/bulan	87,50%	5.442.993.000,00	4.674.604.396,00	85,88%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	14 dokumen	116,67%	296.813.700,00	282.403.000,00	95,14%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	20.000.000,00	15.021.000,00	75,11%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>570.600.000,00</i>	<i>561.814.000,00</i>	<i>98,46%</i>
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	163 paket	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156 orang	160 orang	102,56%	110.200.000,00	109.764.000,00	99,60%
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	129 orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 orang	220 orang	137,50%	460.400.000,00	452.050.000,00	98,19%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>99%</i>	<i>99,00%</i>	<i>679.791.800,00</i>	<i>612.190.381,00</i>	<i>90,06%</i>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	100,00%	26.400.000,00	26.235.000,00	99,38%

NO	SEBELUM			SESUDAH			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00%	136.916.545,00	134.589.000,00	98,30%	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	100,00%	40.000.000,00	33.587.000,00	83,97%	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	71 paket	93,42%	215.148.455,00	183.267.599,00	85,18%	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00%	80.000.000,00	65.556.797,00	81,95%	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	5.500.000,00	4.936.000,00	89,75%	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	175.826.800,00	164.018.985,00	93,28%	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100,00%</i>	<i>216.793.000,00</i>	<i>213.108.000,00</i>	<i>98,30%</i>	
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	2 unit	100,00%	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80%	
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	30 unit	100,00%	16.793.000,00	13.508.000,00	80,44%	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.048.424.224,00</i>	<i>884.155.470,00</i>	<i>84,33%</i>	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	326.930.000,00	205.648.530,00	62,90%	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	6.655.000,00	1.350.000,00	20,29%	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	704.839.224,00	667.256.940,00	94,67%	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>645.495.000,00</i>	<i>512.428.151,00</i>	<i>79,39%</i>	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	38 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	36 unit	36 unit	100,00%	318.000.000,00	187.547.601,00	58,98%	

NO	SEBELUM			SESUDAH			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	4 unit	100,00%	305.495.000,00	305.157.550,00	99,89%	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	100,00%	22.000.000,00	19.723.000,00	89,65%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	71,50 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	71,20 %	73,58 %	103,34%	41.294.857.967,00	40.137.179.595,00	97,20%	
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	11,49%		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	11%	10,76 %	97,82%				
		Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	85%		Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	84%	84,3 %	100,36%				
	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>515.320.000,00</i>	<i>508.184.150,00</i>	<i>98,62%</i>	
25	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	515.320.000,00	508.184.150,00	98,62%	
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>76%</i>	<i>76,00%</i>	<i>37.041.236.922,00</i>	<i>36.123.329.327,00</i>	<i>97,52%</i>	
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	60 unit	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 unit	50 unit	100,00%	194.000.000,00	190.705.000,00	98,30%	
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3489 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3512 unit	3612 unit	102,84%	35.632.116.922,00	34.788.116.558,00	97,63%	
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1537 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1411 unit	1415 unit	100,28%	666.785.000,00	615.745.469,00	92,35%	
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	8650 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7829 unit	7835 unit	100,08%	548.335.000,00	528.762.300,00	96,43%	
	<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>573.669.104,00</i>	<i>539.953.787,00</i>	<i>94,12%</i>	
30	pembangunan terminal/ shelter/ halte	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	6 unit	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	9 unit	9 unit	100,00%	215.000.000,00	210.339.999,00	97,83%	
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 unit	7 unit	100,00%	358.669.104,00	329.613.788,00	91,90%	
	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>217.676.000,00</i>	<i>199.444.992,00</i>	<i>91,62%</i>	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	217.676.000,00	199.444.992,00	91,62%	

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan</i>	100%	<i>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan</i>	100%	100%	100,00%	687.895.000,00	657.703.626,00	95,61%
33	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	34.550.000,00	34.430.000,00	99,65%
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit	100,00%	615.345.000,00	587.133.626,00	95,42%
35	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
36	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	4 Laporan	200,00%	18.000.000,00	16.140.000,00	89,67%
	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	<i>Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	100%	<i>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	<i>Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	100,00%	652.500.000,00	625.144.993,00	95,81%
37	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	155 unit	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	603.500.000,00	580.550.420,00	96,20%
38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	49.000.000,00	44.594.573,00	91,01%
	<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	100%	<i>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	100,00%	44.428.541,00	36.525.000,00	82,21%
39	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	44.428.541,00	36.525.000,00	82,21%
	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</i>	100%	<i>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</i>	100%	100%	100,00%	1.187.015.200,00	1.081.377.736,00	91,10%
40	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	460.071.800,00	410.173.360,00	89,15%
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	726.943.400,00	671.204.376,00	92,33%

NO	SEBELUM			SESUDAH			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah</i>	<i>Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah</i>	100%	<i>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah</i>	<i>Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah</i>	100%	100%	100,00%	286.700.000,00	281.761.170,00	98,28%	
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	33 Unit	100,00%	256.700.000,00	255.086.000,00	99,37%	
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	30.000.000,00	26.675.170,00	88,92%	
	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	100,00%	31.200.000,00	28.401.500,00	91,03%	
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	31.200.000,00	28.401.500,00	91,03%	
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	100,00%	57.217.200,00	55.353.314,00	96,74%	
45	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Unit	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	4 Unit	100,00%	34.900.000,00	34.202.999,00	98,00%	
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	22.317.200,00	21.150.315,00	94,77%	

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	100%	100%	100,00%	750.164.000,00	699.265.513,00	93,22%
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>750.164.000,00</i>	<i>699.265.513,00</i>	<i>93,22%</i>
47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	750.164.000,00	699.265.513,00	93,22%
TOTAL ANGGARAN									51.050.112.691,00	48.674.072.306,00	95,35%

A.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,85	0	200,00%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Persen	71,20	73,58	103,34%	MENUNJANG
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum		11	10,76	97,82%	MENUNJANG
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	18,5	16,9	108,65%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	84	84,30	100,36%	MENUNJANG
							Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian		100	100	100,00%	MENUNJANG
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	75	75,86	101,15%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Angka	100	100	100,00%	MENUNJANG

Dari tabel di atas dapat diketahui secara garis besar seluruh program di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menunjang sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator masing-masing per sasaran dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam mencapai sasaran strategis pertama ditunjang dengan satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan dua indikator yaitu Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dan Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum. Prosentase kendaraan wajib uji telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 73.58 % dari 71.2% yang ditargetkan atau sebesar 103.34% capaiannya. Prosentase kendaraan wajib uji dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$KBWU = \frac{\text{Jumlah kendaraan lulus uji} \times 0.5}{\text{jumlah kbwu}} \times 100\% = \frac{9433 \times 0.5}{6410} \times 100\% = 73,58\%$$

Disisi lain Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) penunjang Sasaran Strategis Meningkatkan kinerja sarana transportasi yaitu Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum. Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum di tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10.76% dari target yang ditetapkan sebesar 11% atau sebesar 97.82% persentasenya. Formula perhitungan Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ruas Jalan yang terlayani angkutan umum}}{\text{Ruas jalan kabupaten}} \times 100\% = \frac{44}{409} \times 100\% = 10,76\%$$

- b. Selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kinerja prasarana transportasi ditunjang oleh dua Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan indikator Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan indikator Prosentase layanan perkeretaapian. Ditahun 2024 Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 84% dari target 84.3% dan Prosentase layanan perkeretaapian juga telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 100% atau capainnya sebesar 100%.
- c. Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public ditunjang dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2024, akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 1.271.855.500,00 sedangkan realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.277.077.700,00 atau dicapai sebesar 100,41%. Hal ini didukung dengan maksimalnya retribusi di tahun 2024 yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, retribusi pelayanan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal, dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2024

No Rekening	Jenis PAD	Target	Realisasi
		2024	2024
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	470.000	864.500
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.202.300.000	1.202.988.300
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	80.400	80.400
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.090.000	15.090.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	730.000	730.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	53.185.100	57.324.500
JUMLAH		1.271.855.500	1.277.077.700

2. Target dan Realisasi Belanja

Berdasarkan APBD-Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan alokasi Rp. 51.050.112.691,00 dan realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 48,674,017,306,00 atau (95,35%), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 2.376.095.385.00. Sisa lebih tersebut secara umum dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sisa anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke kas daerah.

Rincian target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Dinas
Perhubungan Tahun 2024**

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.005.090.724,00	7.837.627.198,00	87,04%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>84.180.000,00</i>	<i>81.902.800,00</i>	<i>97,29%</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	38.166.800,00	95,42%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.180.000,00	43.736.000,00	99,00%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>5.759.806.700,00</i>	<i>4.972.028.396,00</i>	<i>86,32%</i>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.442.993.000,00	4.674.604.396,00	85,88%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	296.813.700,00	282.403.000,00	95,14%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	15.021.000,00	75,11%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>570.600.000,00</i>	<i>561.814.000,00</i>	<i>98,46%</i>
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.200.000,00	109.764.000,00	99,60%
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	460.400.000,00	452.050.000,00	98,19%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>679.791.800,00</i>	<i>612.190.381,00</i>	<i>90,06%</i>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.400.000,00	26.235.000,00	99,38%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.916.545,00	134.589.000,00	98,30%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	33.587.000,00	83,97%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.148.455,00	183.267.599,00	85,18%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	65.556.797,00	81,95%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,00	4.936.000,00	89,75%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.826.800,00	164.018.985,00	93,28%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	10	11	12
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	216.793.000,00	213.108.000,00	98,30%
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80%
17	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.793.000,00	13.508.000,00	80,44%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.048.424.224,00	884.155.470,00	84,33%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	326.930.000,00	205.648.530,00	62,90%
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.655.000,00	1.350.000,00	20,29%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	704.839.224,00	667.256.940,00	94,67%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	645.495.000,00	512.428.151,00	79,39%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	318.000.000,00	187.547.601,00	58,98%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.495.000,00	305.157.550,00	99,89%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000,00	19.723.000,00	89,65%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	41.294.857.967,00	40.137.179.595,00	97,20%
	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	515.320.000,00	508.184.150,00	98,62%
25	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	515.320.000,00	508.184.150,00	98,62%
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	37.041.236.922,00	36.123.329.327,00	97,52%
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	194.000.000,00	190.705.000,00	98,30%
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	35.632.116.922,00	34.788.116.558,00	97,63%
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	666.785.000,00	615.745.469,00	92,35%
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	548.335.000,00	528.762.300,00	96,43%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	10	11	12
	<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	573.669.104,00	539.953.787,00	94,12%
30	pembangunan terminal/ shelter/ halte	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	215.000.000,00	210.339.999,00	97,83%
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	358.669.104,00	329.613.788,00	91,90%
	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	217.676.000,00	199.444.992,00	91,62%
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	217.676.000,00	199.444.992,00	91,62%
	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	687.895.000,00	657.703.626,00	95,61%
33	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.550.000,00	34.430.000,00	99,65%
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	615.345.000,00	587.133.626,00	95,42%
35	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
36	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	16.140.000,00	89,67%
	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	<i>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	652.500.000,00	625.144.993,00	95,81%
37	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	603.500.000,00	580.550.420,00	96,20%
38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	49.000.000,00	44.594.573,00	91,01%
	<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	44.428.541,00	36.525.000,00	82,21%
39	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	44.428.541,00	36.525.000,00	82,21%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	10	11	12
	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	1.187.015.200,00	1.081.377.736,00	91,10%
40	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	460.071.800,00	410.173.360,00	89,15%
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	726.943.400,00	671.204.376,00	92,33%
	<i>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	286.700.000,00	281.761.170,00	98,28%
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	256.700.000,00	255.086.000,00	99,37%
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	26.675.170,00	88,92%
	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	31.200.000,00	28.401.500,00	91,03%
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.200.000,00	28.401.500,00	91,03%
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	57.217.200,00	55.353.314,00	96,74%
45	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	34.900.000,00	34.202.999,00	98,00%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	10	11	12
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	22.317.200,00	21.150.315,00	94,77%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	750.164.000,00	699.265.513,00	93,22%
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	750.164.000,00	699.265.513,00	93,22%
47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	750.164.000,00	699.265.513,00	93,22%
TOTAL ANGGARAN			51.050.112.691,00	48.674.072.306,00	95,35%

BAB IV **P E N U T U P**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Merupakan bukti pertanggungjawaban atas Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatat Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menggambarkan keberhasilan dalam mencapai target tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang telah di tetapkan dalam RKPDN tahun 2024. Di tahun 2024 Dinas Perhubungan telah menetapkan satu tujuan, 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang sesuai dengan RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan yaitu Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi daerah yang baik telah tercapai dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan sebesar 0.03% dari target 0.19.
2. Tercapainya sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya kinerja sarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebesar 0% dari target 0.85%.
3. Tercapainya sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kinerja prasarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi sebesar 16.9% dari target 18.5%.
4. Tercapainya sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public yang diukur dengan indikator NILAI SAKIP sebesar 75.86 dari target 75.

Untuk mencapai target kinerja yang telah di tentukan, di tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memperoleh dana APBD-Perubahan sebesar Rp. 51.050.112.691 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.674.017.306 dengan demikian dapat dikatakan serapan anggaran di tahun 2024 sebesar 95,35% dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.376.095.385 atau sebesar 4,65%.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- a. Kesadaran masyarakat akan budaya berlalu lintas berkeselamatan yang masih belum maksimal;
- b. Sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan yang belum terintegrasi secara optimal;
- c. Sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat yang belum optimal;
- d. Tata kelola sarana angkutan yang belum maksimal.
- e. Belum terdokumentasikan dengan baik dokumen perencanaan daerah dan keuangan di media social.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

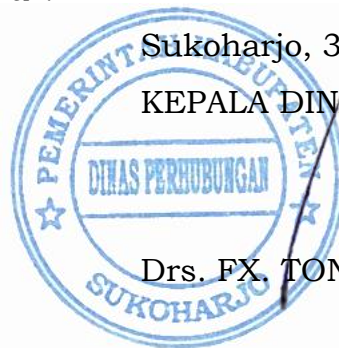
- a. Meningkatkan sosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat serta pengelola angkutan jalan;
- b. Meningkatkan operasi pengendalian dan pengamanan operasional angkutan orang dan barang;
- c. Meningkatkan kajian tata kelola kelalulintasan;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kajian tata kelola angkutan umum;
- f. Meningkatkan kelayakan sarana angkutan jalan.
- g. Meningkatkan peran aktif dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen pendukung perencanaan daerah dengan baik di media

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat memberikan gambaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo kepada pihak terkait dan dapat berperan aktif dalam membangun Kabupaten Sukoharjo Lebih Makmur.

Sukoharjo, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SANTOSA

Jabatan : Plt. BUPATI SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Plt. BUPATI SUKOHARJO,


AGUS SANTOSA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	0.85%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	18.5%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	75

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.005.090.724,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 41.294.857.967,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 750.164.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 51.050.112.691,00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pit. BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA



Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SANTOSA

Jabatan : PIt. BUPATI SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pit. BUPATI SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	0.85%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	18.5%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	75

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	9.005.090.724,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	41.294.857.967,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp.	750.164.000,00	APBD
	Jumlah	Rp.	51.050.112.691,00	

Pihak Kedua,
Ptl. BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.2		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.1		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4.1		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
5.1		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
6.1		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.1		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 84.180.000,00	APBD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.759.806.700,00	APBD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 570.600.000,00	APBD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 679.791.800,00	APBD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 216.793.000,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.048.424.224,00	APBD
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 645.495.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 9.005.090.724,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196611110 199503 1 004

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671210 199312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.2		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.1		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4.1		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
5.1		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
6.1		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.1		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 84.180.000,00	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.759.806.700,00	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 570.600.000,00	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 679.791.800,00	APBD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 216.793.000,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.048.424.224,00	APBD
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 645.495.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 9.005.090.724,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671210 199312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2.	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2.1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
3.	Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
3.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan
4.	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
4.1		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
5.	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000,00	APBD
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 44.180.000,00	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.442.993.000,00	APBD
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 296.813.700,00	APBD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 20.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.843.986.700,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO


NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si


Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2.	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2.1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
3.	Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
3.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan
4.	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
4.1		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
5.	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

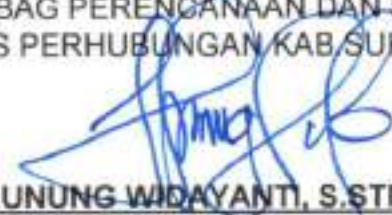
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000,00	APBD
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 44.180.000,00	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.442.993.000,00	APBD
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 296.813.700,00	APBD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 20.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.843.986.700,00	

Sukoharjo, - Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB SUKOHARJO


NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SUSANTO, S.E

Jabatan : PIt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210-199312 1 001

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
PIt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JOKO SUSANTO, S.E
Penata Muda Tk I
NIP. 19790324 200901 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
1.1		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 Paket
2.	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
2.1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
3.1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
4.1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
5.	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga		
5.1		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket
6.	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor		
6.1		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket
7.	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan		
7.1		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
8.1		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
9.	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
9.1		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
10.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
10.1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit
11.	Tersedianya Mebel		
11.1		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit
12.	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
12.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

13.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
14.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan
15.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
15.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
16.1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit
17.	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
17.1		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
18.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 110.200.000,00	APBD
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 460.400.000,00	APBD
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 26.400.000,00	APBD
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 136.916.545,00	APBD
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 40.000.000,00	APBD
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 215.148.455,00	APBD
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 80.000.000,00	APBD
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.500.000,00	APBD
9.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 175.826.800,00	APBD
10.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 16.793.000,00	APBD
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000,00	APBD

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 326.930.000,00	APBD
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 6.655.000,00	APBD
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 704.839.224,00	APBD
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 318.000.000,00	APBD
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 305.495.000,00	APBD
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 22.000.000,00	APBD
18	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 200.000.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 3.161.104.024,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
Pit. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

JOKO SUSANTO, S.E.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19790324 200901 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM


Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1.1		Persentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1		Persentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
3.1		Persentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4.1		Persentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5.1		Persentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 515.320.000,00	APBD
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 37.041.236.922,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 217.676.000,00	APBD
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 652.500.000,00	APBD
5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 44.428.541,00	APBD
Jumlah	Rp. 38.471.161.463,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Pihak Pertama,
**KABID LALU LINTAS
 DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004



HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom

Pembina
 NIP. 19780103 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM


Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1.1		Persentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1		Persentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
3.1		Persentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4.1		Persentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5.1		Persentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 515.320.000,00	APBD
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 37.041.236.922,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 217.676.000,00	APBD
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 652.500.000,00	APBD
5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 44.428.541,00	APBD
Jumlah	Rp. 38.471.161.463,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
 KABUPATEN SUKOHARJO**

Pihak Pertama,
**KABID LALU LINTAS
 DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004



HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom

Pembina
 NIP. 19780103 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAD FAKHRUDIN, S.M
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

FUAD FAKHRUDIN, S.M
Penata
NIP. 19851114 201101 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
1.1		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit
2.	Terlaksananya Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
2.1		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1411 Unit
3.	Terlaksananya Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
3.1		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7829 Unit
4.	Terwujudnya dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
4.1		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 194.000.000,00	APBD
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 666.785.000,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 548.335.000,00	APBD
4. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 603.500.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 2.012.620.000,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN



HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



FUAD FAKHRUDIN, S.M
Penata
NIP. 19851114 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAD FAKHRUDIN, S.M
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, Oktober 2024
Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

FUAD FAKHRUDIN, S.M
Penata
NIP. 19851114 201101 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
1.1		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit
2.	Terlaksananya Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
2.1		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1411 Unit
3.	Terlaksananya Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
3.1		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7829 Unit
4.	Terwujudnya dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
4.1		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 194.000.000,00	APBD
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 666.785.000,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 548.335.000,00	APBD
4. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 603.500.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 2.012.620.000,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO



HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015



FUAD FAKHRUDIN, S.M
Penata
NIP. 19851114 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom.

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina

NIP. 19780103 200604 1 015

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Penata Tingkat I

NIP. 19830828 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1.		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen
2.	Tersedianya Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1.		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3512 Unit
3.	Terwujudnya laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
3.1		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan
4.	Terwujudnya laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		
4.1		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	11 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 515.320.000,00	APBD
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 35.632.116.922,00	APBD
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 35.632.116.922,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp. 44.428.541,00	APBD
Jumlah	Rp. 71.823.982.385,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19830828 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom.

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina

NIP. 19780103 200604 1 015

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Penata Tingkat I

NIP. 19830828 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1.		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen
2.	Tersedianya Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1.		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3512 Unit
3.	Terwujudnya laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
3.1		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan
4.	Terwujudnya laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		
4.1		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	11 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 515.320.000,00	APBD
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 35.632.116.922,00	APBD
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 35.632.116.922,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp. 44.428.541,00	APBD
Jumlah	Rp. 71.823.982.385,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015



EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19830828 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
1.1		Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.1		Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3.1		Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
4.1		Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1		Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 573.669.104,00	APBD
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 687.895.000,00	APBD
3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 286.700.000	APBD
4. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.200.000,00	APBD
5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.217.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.636.681.304,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
**KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO**

AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
1.1		Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.1		Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3.1		Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
4.1		Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1		Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 573.669.104,00	APBD
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 687.895.000,00	APBD
3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 286.700.000	APBD
4. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.200.000,00	APBD
5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.217.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.636.681.304,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Pihak Pertama,
**KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO**


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PRIH HARTANTO, SS. MM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

EKO PRIH HARTANTO, SS. MM
Pembina
NIP. 19790212 200604 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembangunan terminal Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
1.1		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	9 Unit
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
2.1		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	7 unit
3.	Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3.1		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit
4.	Terwujudnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
4.1		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terwujudnya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
5.1		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
6.	Terwujudnya laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
6.1		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan
7.	Terwujudnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		
7.1		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rp. 215.000.000,00	APBD
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp. 358.669.104,00	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Rp. 256.700.000,00	APBD
4	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000,00	APBD
5	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 31.200.000,00	APBD
6	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp. 34.900.000,00	APBD
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 22.317.200,00	APBD
	Jumlah	Rp. 733.786.304,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN

AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina

NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO

EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Pembina

NIP. 19790212 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007


EKO PRIH HARTANTO, SS. MM
Pembina
NIP. 19790212 200604 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembangunan terminal Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
1.1		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	9 Unit
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
2.1		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 unit
3.	Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3.1		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit
4.	Terwujudnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
4.1		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terwujudnya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
5.1		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
6.	Terwujudnya laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
6.1		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan
7.	Terwujudnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		
7.1		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rp.	215.000.000,00	APBD
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp.	358.669.104,00	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Rp.	256.700.000,00	APBD
4	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	30.000.000,00	APBD
5	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	31.200.000,00	APBD
6	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp.	34.900.000,00	APBD
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	22.317.200,00	APBD
Jumlah		Rp.	733.786.304,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO


AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007


EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Pembina
NIP. 19790212 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARYANI, SE
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

KARYANI, SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009

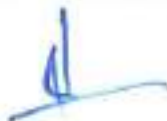
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
1.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit
2	Terwujudnya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.1		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	615.345.000,00	APBD
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	20.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp.	635.345.000,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN



AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



KARYANI, SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARYANI, SE
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN – AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007


KARYANI, SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
1.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit
2	Terwujudnya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.1		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 615.345.000,00	APBD
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 20.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 635.345.000,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN


AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO


KARYANI, SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKADI

Jabatan : KEPALA BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. SUKADI
Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		
1.1		Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2.1		Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 1.187.015.200,00	APBD
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 750.164.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.937.179.200,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004


Drs. SUKADI
Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKADI
Jabatan : KEPALA BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. SUKADI
Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		
1.1		Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2.1		Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 1.187.015.200,00	APBD
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapiian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 750.164.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.937.179.200,00	

Sukoharjo, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004


Drs. SUKADI
Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001